

BAB 2
DINAMIKA POLITIK INDONESIA PADA MASA TRANSISI MENUJU
ORDE BARU 1965-1967

2.1 Peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan Penumpasan PKI

Gerakan 30 September 1965 merupakan peristiwa yang tak lepas dari sejarah bangsa Indonesia. G30S memiliki beberapa penyebutan, Presiden Sukarno menyebutnya sebagai GESTOK (Gerakan 1 Oktober), TNI-AD menamainya dengan sebutan GESTAPU (Gerakan September Tiga Puluh) dengan sindiran yang mengacu pada Gestapo Nazi Jerman, kemudian istilah tersebut dirubah menjadi G30S/ PKI (Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia) untuk membuktikan keterlibatan PKI dalam GESTAPU.²¹ TNI-AD menganggap PKI terlibat dalam peristiwa G30S dan memiliki tujuan untuk merampas kekuasaan Presiden Sukarno, sementara bagi PKI, peristiwa tersebut merupakan usaha yang bertujuan untuk menyelamatkan Presiden Sukarno dari pihak-pihak yang dianggap akan mengambil alih kekuasaannya.²²

G30S 1965 terjadi setelah kabar tentang kesehatan Presiden Sukarno yang semakin merosot sepulang dari Paris sehingga peristiwa ini lebih menunjukkan pada persaingan antara PKI dan ABRI²³ untuk mengambil alih kekuasaan Presiden Sukarno. Peristiwa ini telah menewaskan enam orang pemimpin tantara Indonesia.

²¹ Abdul Haris Fatgehipon, *The 30th September Movement and the Emerging of the New Order Regime in Indonesia*. Sosiohumanika. Volume 2, No. 1, 2009, hlm, 2

²² Rohani Ab Ghani dan Muhammad Saleh Tajuddin, *G30S/PKI dan Tragedi Lubang Buaya: Sebuah Trilogi*. Journal of Nusantara Studies. Volume 2, No. 2, 2017, hlm 296

²³ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Jenderal Ahmad Yani dan dua orang jenderal lain dibunuh langsung di rumah mereka, kemudian Nasution berhasil meloloskan diri meski ajudannya ditangkap dan putrinya tertembak. Gerakan tersebut terlihat tidak cakap dan menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Ketiga jenderal yang telah dibunuh, tiga orang jenderal dan satu ajudan yang berhasil ditangkap hidup-hidup dibawa ke pangkalan udara Halim dengan seijin Omar Dhani²⁴ yang ikut memberikan dukungan pada gerakan ini dan menjadikan pangkalan udara Halim sebagai markas besar.²⁵ Tawanan yang masih hidup kemudian dibunuh secara kejam. Aksi pembunuhan melibatkan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan Pemuda Rakyat PKI. Empat tawanan yang telah dibunuh dimasukkan ke dalam sumur yang tidak terpakai lagi bersama dengan tiga jenderal yang telah terbunuh di rumahnya, sumur tersebut dikenal sebagai Lubang Buaya hingga saat ini. Lubang buaya terletak di Pondok Gede Jakarta Timur, tempat tersebut menjadi pusat pelatihan dari Partai Komunis Indonesia termasuk pasukan wanita yang menamai diri mereka dengan nama Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani.

Gerwani merupakan organisasi perempuan terbesar dan paling radikal di Indonesia yang berafiliasi dengan PKI. Gerwani mendukung PKI karena adanya kesamaan gagasan di antara mereka yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan dan emansipasi perempuan, namun bagi Soeharto, komunisme justru menyebabkan perempuan-perempuan Indonesia menjadi istri yang tidak setia, ibu yang buruk dan

²⁴ Omar Dhani merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat

²⁵ Ricklefs, M, C. *op cit* hlm 553-554

bertentangan dengan ideologi negara Indonesia “Pancasila” dan nilai-nilai agama.²⁶ Gerwani hanya terlibat dalam aksi pembunuhan saja sementara operasi penculikan para jenderal dilakukan oleh satu bataliyon pengawal Presiden Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, kemudian terdapat dua bataliyon infanteri yang berasal dari Komando Daerah Militer (KODAM) yang ikut dalam operasi penculikan yaitu KODAM Brawijaya Jawa Timur (Yonif 530) dan KODAM Diponegoro Jawa Tengah (Yonif 454) yang pada saat itu datang ke Jakarta untuk menghadiri HUT ABRI di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1965.²⁷ Kedua Batalyon tersebut tidak memiliki persiapan untuk berperang. Orang-orang sipil dari Pemuda Rakyat PKI juga bergabung dalam operasi tersebut.

Letkol Untung langsung menyiarkan aksi G30S pada pukul 7 pagi di stasiun radio pemerintah, Radio Republik Indonesia (RRI) mengenai usaha kudeta yang akan dilakukan oleh Dewa Jenderal. Isi dari siaran itu mengatakan bahwa Untung telah memimpin Gerakan 30 September untuk menentang Dewan Jenderal yang sedang mencoba untuk mengambil alih pemerintahan, Letkol Untung secara terang-terangan menyiarkan bahwa ia dan pasukannya telah menangkap beberapa orang jenderal dan menguasai sarana komunikasi dan hal penting lainnya yang sudah berada di bawah kekuasaan G30S. Letkol Untung juga menyiarkan bahwa akan adanya Dewan Revolusi yang didirikan sebagai tindak lanjut dari G30S. Letkol

²⁶ Aubrey Kandelila Fanani, *How the Anti-Cummunist Narrative Marginalized the Women’s Movement in Indonesia*. (Nasional Yang Ming Chiao Tung University: Inter-Asia Cultural Studies. 2022) hlm 3

²⁷ Abdul Haris Fatgehipon, Loc. Cit

Untung kemudian menghimbau kepada seluruh prajurit untuk menjaga jarak dari Dewan Jenderal.²⁸

Letkol Untung menghilang setelah menyiarkan pengumumannya, stasiun radio kemudian diserang oleh Angkatan Darat dan berhasil menguasai kembali stasiun radio tanpa perlawanan berarti dari pasukan G30S. Brigjen Ibnu Subroto segera melakukan siaran dari rekaman Soeharto yang berisikan sebuah pengumuman:

“Pada tanggal 1 Oktober 1965, G30S telah menculik enam jenderal Angkatan Darat. Kemudian RRI dan kantor pusat telekomunikasi jatuh di bawah kekuasaan G30S. Presiden Sukarno dalam keadaan aman dan sehat. Sementara itu saya telah mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Angkatan Darat, Laut, dan Kepolisian telah sepakat dan memutuskan untuk bekerja sama menumpas G30S. G30S telah membentuk Dewan Revolusi yang sesungguhnya mengambil alih secara illegal atau merebut kekuasaan. Mereka mengumumkan bahwa Kabinet Dwikora berhenti bekerja dan menculik petinggi Angkatan Darat. Sebagai konsekuensinya ini jelas adalah kontrarevolusi dan harus dikalahkan.”²⁹

Mayjen Soeharto yang tidak termasuk dalam daftar penculikan segera mengambil alih kepemimpinan angkatan bersenjata yang kosong dengan alasan sudah terbiasa ditugaskan apabila Ahmad Yani sedang berada di luar negeri, Soeharto juga berusaha menghubungi jenderal-jenderal angkatan darat, angkatan kepolisian, dan angkatan laut untuk meminta persetujuan. Soeharto kemudian memimpin pasukan untuk menyerbu Halim pada tanggal 2 Oktober 1965 dan berlangsung beberapa pertempuran kecil hingga akhirnya komandan angkatan

²⁸ Retnowati Abdulgani-Knapp, *Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second President*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka. 2007, hlm 43-45

²⁹ *Ibid*, hlm 48-49

udara memerintahkan untuk menghentikan tembak menembak.³⁰ Kudeta di Jakarta berakhir. Mayat para jenderal ditemukan pada tanggal 3 Oktober dan dimakamkan secara besar-besaran pada peringatan Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober.

PKI dianggap sebagai dalang dari G30S dengan bukti pidato D.N. Aidit sebagai ketua PKI pada saat itu pernah berpidato mengenai keinginan PKI untuk mengganti Pancasila pada Oktober 1963 di depan peserta Pendidikan Kader Revolusi, D.N. Aidit mengatakan “Kalau kita sudah bersatu Pantjasila tidak diperlukan lagi, sebab Pantjasila adalah alat pemersatu. Pantjasila sebagai filsafat persatuan, tetapi masing-masing golongan sudah punya faham sendiri-sendiri.”³¹ Presiden Sukarno memberikan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) kepada Soeharto sebagai simbol pendelegasian wewenang untuk mengamankan negara.³² Soeharto kemudian menggunakan wewenang ini untuk membubarkan PKI sebagai langkah pertamanya. Para perwira angkatan darat yang anti-PKI dan memiliki keinginan untuk membatasi dan melarang PKI pada saat itu sudah memiliki hak dan kesempatan untuk memusnahkannya termasuk orang-orang sipil yang anti-PKI, khususnya para aktivis Islam yang sangat menyetujui tindakan tersebut dengan sepenuh hati.

Kampanye pembunuhan PKI dipimpin oleh Sarwo Edhi yang merupakan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), ia memiliki

³⁰ Ricklefs, M, C. *op cit* hlm 556

³¹ “Kuliah/Tanja-Djawab/Pendjelasan J.M Menko D.N. Aidit Dimuka Peserta Pendidikan Kader Revolusi Angkatan Dwikora Tanggal 18 Oktober 1964”, *Harian Rakjat*, 30 Oktober 1964.

³² Historia, *SUPERSEMAR: Cara Soeharto Mendapatkan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2019, hlm 59

keinginan untuk membalas kematian Ahmad Yani yang telah menjadi teman dan pelindungnya di Angkatan Darat.³³ Sarwo Edhi pergi ke Semarang segera setelah usaha kudeta G30S gagal. Kampanye pembunuhan menjadi sangat ganas di beberapa tempat seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali dimana sudah ada ketegangan bertahun-tahun antara masyarakat non-PKI dengan PKI terkait program *land reform* yang merujuk pada UU Agraria 1960 yang tidak ada implimentasinya. PKI seringkali melakukan aksi sepihak dengan menjarah tanah orang, termasuk Perkebunan negara di Sumatera Utara, tanah pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan tanah-tanah milik tuan tanah di Bali yang kemudian membuat masyarakat tidak segan untuk mendukung aksi-aksi pembunuhan terhadap anggota PKI.

TNI dan masyarakat menjadikan pembunuhan sebagai hal yang sah untuk dilakukan, termasuk memenjarakan dan menindas jutaan orang setelahnya yang tertuduh sebagai anggota atau simpatisan PKI.³⁴ PKI dianggap sebagai ancaman terbesar bagi negara dimana telah membunuh para pimpinan di Angkatan Darat pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 sehingga pembunuhan massal terhadap para anggota PKI terjadi. Pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto juga mengeluarkan pernyataan resmi untuk menegaskan bahwa G30S merupakan usaha kudeta yang dilakukan oleh PKI dengan tujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunisme termasuk demokrasi Pancasila yang akan

³³ Jusuf Wanandi, *Menyibak Tabir Orde Baru, Memoar Politik Indonesia 1965-1998*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2014, hlm 91

³⁴ Baskara T. Wardaya, *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto*. Yogyakarta: Galangpress. 2007, hlm 21-22

diganti dengan demokrasi komunis alias demokrasi proletary.³⁵ MPRS menindaklanjuti dengan mengeluarkan TAP NoXXV/MPRS/1966 yang berisi pembubaran organisasi PKI, dengan dikeluarkannya aturan tersebut maka PKI menjadi organisasi yang terlarang di seluruh wilayah Indonesia termasuk kegiatan didalamnya juga penyebaran dan pengembangan ajaran dari komunisme.³⁶ Masyarakat menjadi tak mampu untuk membedakan antara “Operasi Militer Gerakan Tigapuluh September” dengan “pembantaian massal” yang berlangsung dimulai tiga minggu setelah peristiwa G30S terjadi.³⁷

Hampir seluruh masyarakat Indonesia yang hidup pada masa itu mengetahui adanya penumpasan PKI.³⁸ Penumpasa PKI Mereka menyaksikan sendiri atau mendengar tentang gerombolan orang yang berkeliaran di jalan-jalan mencari anggota PKI; para tantara yang datang menangkap anggota PKI; tetangga, teman, atau saudara yang hilang secara misterius; jasad-jasad para korban yang bergelatakan dijalanan atau mengapung di sungai; sekolah dan gedung pemerintah yang kemudian menjadi kamp tahanan dan pusat penyiksaan.³⁹ PKI berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, namun Soeharto tidak hanya menumpas anggota PKI tetapi juga melenyapkan seluruh simpatisannya, anggota Gerwani, etnis Tionghoa, dan orang-orang yang diduga beraliran kiri. Beberapa simpatisan

³⁵ Arin Kusuma Ningrum, *Awal Orde Baru*. Singkawang: Maraga Borneo Tarigas. 2019, hlm 3

³⁶ Dewi Ambar Sari dan Lazuardi Adi Sage, *Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto*. Jakarta: Jakarta Citra. 2006, hlm 70

³⁷ Baskara T. Wardaya. *op cit* hlm 25

³⁸ John Roosa, Ayu Ratih, Hilmar Farid, *Tahun yang Tak Pernah Berakhir Memahami Pengalaman Korban 65 Esai-esai Sejarah Lisan*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advoasi Masyarakat (Elsam). 2004, hlm 8

³⁹ *Ibid.*

dibunuh dalam serangan milisi ke desa-desa, sementara yang lainnya dibunuh ketika sudah berada dalam tahanan militer.

Penumpasan PKI menelan korban yang tidak sedikit, setidaknya ada 500.000-1.000.000 orang yang terbunuh dan lebih dari 20.000 orang menjadi tahanan politik, sementara hanya 800 orang yang diadili melalui persidangan.⁴⁰ Sukarno juga membentuk sebuah tim pencari fakta yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Dr. Soemarno Sosroatmodjo yang melaporkan bahwa dalam enam bulan pertama setelah peristiwa G30S terjadi terdapat sekitar 800.000 orang yang terbunuh di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.⁴¹ Sedikitnya terdapat setengah juta orang terbunuh, 12.000 diasingkan ke pulau Buru selama 10 tahun, 300.000 dipenjarakan, dan jutaan lainnya mendapat distigmatisasi dari sebuah rezim fasis dan hidup dalam kenistaan.⁴² Rezim yang berkuasa setelah pemerintahan Sukarno memberikan bermacam angka statistik yang berbeda mengenai jumlah korban pembantaian setelah peristiwa G30S terjadi, kemungkinan jumlahnya lebih besar dari yang telah diperkirakan.

Pembantaian yang berlangsung tidak ditanggapi oleh pemerintah karena tidak adanya kepastian politik yang timbul akibat Supersemar. Supersemar membuat adanya dualisme kepemimpinan nasional antara Sukarno dan Soeharto. Para pejabat pemerintah lain juga sibuk menyelamatkan diri masing-masing dari tuduhan sebagai anggota atau simpatisan PKI yang beraliran kiri dan takut akan pembantaian yang terjadi. Kaum intelektual Indonesia tidak ada yang menunjukkan

⁴⁰ Aubrey Kandelila Fanani. *op cit* hlm 1

⁴¹ Jusuf Wanandi. *op cit* hlm 94

⁴² Martin Aleida. *op cit* hlm 5

diri untuk memprotes rezim Soeharto ketika terjadi pembantaian massal.⁴³ Soe Hok Gie menjadi satu-satunya yang berani mengatakan di pers bahwa pembantaian dan penangkapan anggota PKI merupakan hal yang salah walaupun sebelumnya dia aktif melawan PKI.

Soeharto mengeluarkan pernyataan pada peringatan Supersemar yang ke-5 yang pada saat itu Soeharto telah menjadi presiden Indonesia. Soeharto mengatakan bahwa alasan banyaknya korban berjatuhan dikarenakan adanya prasangka-prasangka buruk antar golongan yang telah terjadi selama bertahun-tahun dan rakyat yang bertindak sendiri.⁴⁴ Dalang dibalik Gerakan 30 September ini masih menjadi tanda tanya dengan banyak teori yang ada, historiografi yang tersedia tidak mencukupi untuk menarik kesimpulan secara tegas siapa dalang sebenarnya,⁴⁵ terdapat juga yang mengatakan bahwa G30S merupakan sebuah alasan yang dikenakan untuk bisa ‘membersihkan’ komunis dari Indonesia. Gerakan 30 September 1965 diakhiri dengan penumpasan seluruh anggota PKI, terdapat satu pertanyaan yang sering muncul mengenai PKI, mengapa PKI yang pada saat itu menguasai situasi dan memiliki 30 juta pengikut di berbagai bidang masyarakat berubah menjadi “ayam sayur” yang segera mati pada gerakan pertama?⁴⁶

2.2 Pergeseran Kekuasaan dari Sukarno kepada Soeharto

Gerakan 30 September 1965 merupakan peristiwa besar yang kemudian menjadi awal dari sebuah rezim baru, yaitu Orde Baru. Banyak teori yang

⁴³ Ibrahim Isa, *op cit* hlm 124

⁴⁴ John Roosa, Ayu Ratih, Hilmar Farid. *op cit* hlm 10

⁴⁵ Muhammad Aswan Zanynu, *op cit* hlm 38

⁴⁶ Julius Pour, *G30S, Fakta atau Rekayasa*. Jakarta: Kasta Hasta Pustaka. 2013, hlm 60

bermunculan dari para peneliti politik dan sejarah di Indonesia mengenai peristiwa 30 September 1965. Tafsiran-tafsiran dari teori tersebut berusaha menisbahkan pada PKI, angkatan darat, Sukarno, atau Soeharto. Tiga dekade pemerintahan Soeharto berjalan hanya ada satu narasi yang selalu disebutkan yaitu PKI merupakan dalang dari peristiwa G30S. Film berjudul *Pengkhianatan Gerakan 30 September/ PKI* menjadi tontonan wajib bagi anak sekolah setiap peringatan G30S.⁴⁷ Anak sekolah juga diajarkan tentang kejahatan Partai Komunis dan ideologi berbahaya mereka melalui buku sejarah yang didukung oleh guru-guru pada saat itu yang mengatakan bahwa komunis adalah ateis, anti-demokrasi, dan memimpin negara menuju kediktatoran.⁴⁸

PKI bukanlah pelaku reformasi dan dianggap bukan sebagai promotor kudeta karena hanya akan merugikan PKI yang pada saat itu sudah nyaman berada di bawah rezim Sukarno dengan gagasan NASAKOM nya dan pada saat itu suara politik PKI sudah mendominasi, meski tanpa melakukan kudeta, PKI memiliki kemungkinan untuk bisa memenangkan pemerintahan lewat pemilihan umum. Letkol Untung yang merupakan pemimpin dari sebuah revolusi ini diragukan bahwa ini bukanlah revolusi nyata. Letkol Untung hanyalah perwira junior Angkatan Darat yang selalu setia kepada Sukarno dan tidak mengerti perihal politik, sementara dalam setiap revolusi di banyak negara selalu dipimpin oleh

⁴⁷ Muhammad Aswan Zanynu, *Soeharto dan Gerakan 30 September (G30s) dalam Narasi Memori Media Berita Daring Indonesia*. Jurnal Komunikasi. Volume 4, No. 1, 2019, hlm 28

⁴⁸ Modelia Novinta Desweriel, *How Indonesian Exiles in the Czech Republic Understand Their Statelessness and Eventual Citizenship*. Thesis. (Faculty of Social Studies Masarykova Univerzita. 2021), hlm 55

perwira senior Angkatan Darat yang dikenal luas dan memiliki pengaruh yang besar. Banyak pihak yang menilai bahwa Letkol Untung hanya dikorbankan untuk tujuan lain dan tidak ada bukti di pengadilan yang dapat membuktikan bahwa Untung adalah agen partai Komunis.⁴⁹ Letkol Untung memiliki kedekatan dengan Soeharto yang merupakan satu-satunya pemimpin Angkatan Darat yang tidak menjadi korban G30S.

Soeharto dapat dikatakan dekat dengan Letkol Untung dalam lingkungan militer maupun di luar lingkungan militer, Soeharto pernah menjadi pimpinan Untung ketika bertugas di Solo, Jawa Tengah. Soeharto dan Untung pernah mengikuti perjuangan kemerdekaan Papua (Irian Barat) dari Belanda pada tahun 1962. Soeharto juga pernah mengatakan bahwa ia mengenal Letkol Untung dalam sebuah rapat staf yang membicarakan mengenai siaran radio yang dibawakan oleh Letkol Untung mengenai pernyataan dari Dewan Revolusi. “Saya mengenal Untung sejak 1945 dan dia memang merupakan murid dari pimpinan PKI, Alimin, ...”⁵⁰ Bukti lain mengenai kedekatan Soeharto dan Untung yaitu Soeharto menjadi atasan Untung ketika Untung masuk Korem Surakarta dan Untung merupakan anak kesayangan Yani dan Soeharto ketika penumpasan dari pemberontakan PRRI/Permesta dan Operasi Mandala sukses dilakukan. Letkom CPM (Purnawirawan) Suhardi mengatakan bahwa Soeharto yang merekomendasikan Untung untuk masuk pasukan Tjakrabirawa, kemudian Syukur yang merupakan tetangga dari istri Untung mengatakan bahwa Soeharto hadir dalam pesta pernikahan Untung.⁵¹

⁴⁹ Abdul Haris Fatgehipon. *op cit* hlm 3

⁵⁰ Retnowati Abdulgani-Knapp. *op cit* hlm 46

⁵¹ Muhammad Aswan Zanyu, *op cit* hlm 36

Soeharto sedang berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto ketika G30S terjadi untuk menemani anaknya yang terkena siraman air panas. Kolonel Latief mengatakan sebelum G30S terjadi ia pergi mengunjungi Soeharto untuk memberitahukan gerakan Dewan Jenderal dalam pembelaannya di pengadilan.⁵² Kolonel Latief pernah meminta Soeharto untuk menjadi saksi ketika ia disidang dalam Mahkamah Militer Tinggi, permintaan tersebut tidak digubris oleh Mahmiliti dan Soeharto. Kolonel Latief kemudian mengajukan kepada majelis hakim agar Soeharto diajukan di muka sidang namun permintaan itu juga tak digubris.⁵³ Kolonel Latief tidak pernah mengurai lebih lanjut mengenai pernyataannya itu, ia tidak memberikan keterangan baru bahkan setelah ia dibebaskan dari penjara pada tahun 1998, ia hanya mengajukan surat kepada Presiden Abdurrahman Wahid agar Soeharto diajukan ke pengadilan untuk diadili kasus korupsi-kolisi-nepotisme.

Subandrio yang merupakan menteri yang loyal kepada Sukarno mengkaji peran para mantan anak buah Soeharto di Kodam Diponegoro, ia memperlihatkan bahwa kudeta G30S terkesan sengaja untuk gagal dengan keterlibatan Soeharto. Subandrio menganggap bahwa Soeharto melakukan kudeta merangkak yang merupakan rangkaian kegiatan untuk mengambil kursi kepresidenan, menurutnya terdapat empat tahap kudeta merangkak Soeharto,⁵⁴ yaitu tahap pertama, menyingkirkan para pesaingnya di Angkatan Darat seperti Ahmad Yani dan yang

⁵² Retnowati Abdulgani-Knapp. *op cit* hlm 54

⁵³ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Fakta-fakta Menarik di Sekitar Persidangan Pelaku Pemberontakan G 30 S/PKI*. Jakarta: Tempo Publishing. 2019, hlm 60-61

⁵⁴ Syarkawi Manaf, *Kisah Perjalanan*. Bandung: Ultimus. 2009, hlm 60

lainnya, tahap kedua, membubarkan PKI yang sampai saat itu masih menjadi musuh terberat tantara, tahap ketiga, melemahkan kekuatan pendukung Sukarno dengan menangkap 15 menteri yang loyal terhadap Sukarno, termasuk Subandrio sendiri, tahap akhir yaitu mengambil alih kekuasaan Sukarno.

Soeharto melakukan pengambilan kekuasaan ini dengan serius. Supersemar tidak dikeluarkan begitu saja. Jenderal Alamsyah menjadi perantara untuk Soeharto mengutus Dasat dan Hasyim Ning pada tanggal 9 Maret 1966. Dasat dan Hasyim Ning berangkat ke Istana Bogor untuk membujuk Sukarno menyerahkan kekuasaan, namun tidak berhasil, maka yang dilakukan selanjutnya yaitu menekan Sukarno dengan demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa pada tanggal 11 Maret 1966. Kantor PKI di Kramat dan Gedung Kedutaan Besar Cina dibakar oleh massa yang melakukan unjuk rasa pasca terjadinya peristiwa G30S. Spanduk-spanduk membentang di mana-mana bertuliskan “Bubarkan PKI”, “Gantung Aidit”, dan “PKI menentang Tuhan”, bukan hanya itu saja spanduk juga berisikan isu anti Sukarno seperti “Jual Emas Monas Buat Bayar Gaji Pegawai”, “Stop Import Istri”, dan lain-lain. Para mahasiswa yang anti-PKI membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) sebuah organisasi kemahasiswaan yang mendapat dukungan dan perlindungan dari tantara. Para pelajar sekolah menengah juga ikut membentuk organisasi bernama Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia (KAPPI), sementara alumni universitas membentuk Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI). Kesatuan

lain juga terbentuk yaitu Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI).⁵⁵

Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki tujuan untuk memperjuangkan tiga tuntutan yang dikenal dengan sebutan Tritura (tiga tuntutan rakyat). Tritura berisikan tuntutan kepada presiden untuk membubarkan PKI, merombak Kabinet Dwikora dimana masih terdapat anggota PKI didalamnya, dan menurunkan harga bahan pokok yang melambung tinggi akibat inflasi. Inflasi terjadi sejak awal 1960-an, laju inflasi mencapai 660 persen pada tahun 1966, hal ini terjadi berawal dari banyaknya proyek yang dikenal dengan sebutan proyek mercusuar, seperti ASIAN Games, Stadion Snayan, Hotel Indonesia, Monas, dan lain-lain. Proyek tersebut mengakibatkan defisit anggaran belanja menjadi kronis.⁵⁶ Harga-harga melambung tinggi, harga beras meningkat 1.000 kali lipat, dari Rp. 6,5 menjadi Rp. 6.500, harga bus Rp. 200 menjadi Rp. 1.000. Mahasiswa-mahasiswa sudah tidak tahan lagi dengan harga-harga yang melambung tinggi yang kemudian membuat mereka merencanakan untuk mengadakan aksi-aksi, namun banyak yang menafsirkan bahwa kenaikan harga terjadi untuk mengalihkan perhatian rakyat dari fokus pengganyangan PKI.⁵⁷

Puluhan ribu mahasiswa berdemonstrasi di jalanan selama lima hari berturut-turut sejak 10 Januari 1966, mereka semakin beringas pada 15 Januari saat Sukarno

⁵⁵ Yosima Halawa, Subaryana, Anggar Kaswati, *Masa Orde Baru dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Bangsa Indonesia tahun 1966-1977*. Tjantrik: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah. Volume 1, No. 1, 2022, hlm 14

⁵⁶ Onghokham, *Sukarno, Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965*. Depok: Komunitas Bambu. 2009, hlm 159

⁵⁷ Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demonstran*. Jakarta: LP3ES. 2012, hlm 126

mengadakan sidang kabinet lengkap di Istana Bogor untuk membicarakan demonstrasi mahasiswa dan tuntutan-tuntutannya, para menteri yang datang dengan mobilnya mendapatkan pukulan pada bagian depan dan belakang mobil mereka, juga jendela-jendela mobil mereka. Para mahasiswa bukan hanya melakukan itu ketika sidang kabinet saja, apabila menemui mobil menteri di jalan maka mereka akan mengejanya sambil meninju dinding-dindingnya. Corps Polisi Militer (CPM) yang melihat tindakan mahasiswa tersebut diam saja dan tidak melakukan tindakan apapun untuk melindungi menteri.⁵⁸ Situasi yang kacau balau tersebut dimanfaatkan oleh pimpinan angkatan darat untuk keuntungannya sendiri menjadi satu hal yang pasti pada saat itu.⁵⁹ Situasi yang kacau juga dimanfaatkan oleh NU yang berusaha untuk mempertahankan Islam tradisional, namun NU tetap menjadi oposisi yang aktif dan keras sebelum dan sesudah peristiwa G30S 1965 terjadi.

Kudeta merangkak tidak hanya dilakukan oleh Soeharto dan kelompoknya, bersamaan dengan itu, MPRS juga melakukan kudeta merangkaknya. Kudeta merangkak MPRS membantu Soeharto untuk mengalihkan kekuasaan secara Yuridis. Ketetapan dan keputusan-keputusan Sidang MPRS menjadi tonggak baru dalam keranegaraan,⁶⁰ namun setelah jabatan presiden dapat diraih oleh Soeharto, MPRS perlahan-lahan mulai dimatikan. Orde Baru memulai pemerintahannya dalam situasi yang kacau, untuk memperbaiki kekacauan tersebut, Soeharto yang telah mengambil-alih kekuasaan menamakan pemerintahannya dengan sebutan

⁵⁸ *Ibid*, hlm 132-133

⁵⁹ Ricklefs, M, C. *op cit* hlm 557

⁶⁰ Litbang Kompas, *Soeharto Mendapatkan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2020, hlm 42

“Orde Baru” dan secara sepihak menyebut pemerintahan sebelumnya dengan sebutan “Orde Lama”. Kata “Baru” memberi arti hal yang baik juga memberi harapan, sementara kata “Lama” memberi arti yang berkaitan dengan sifat-sifat negatif seperti kecenderungan manipulative dan tidak kompeten dalam melaksanakan pemerintahan.⁶¹ Istilah tersebut juga digunakan sebagai pembatas untuk memisahkan antara pemerintahan Sukarno dengan pemerintahan Soeharto. Soeharto membutuhkan waktu selama tiga tahun untuk menggusur Sukarno tanpa terkesan melakukan kudeta terhadap presiden. Soeharto dengan penuh kesadaran melakukan secara konstitusional melalui DPR dan MPRS, lembaga yang berwenang untuk mencabut jabatan Presiden Sukarno dan memberikannya kepada Soeharto.⁶²

2.3 Kebijakan Orde Baru untuk WNI di Luar Negeri

Orde Baru telah memulai pemerintahannya, dengan dilakukannya pemecatan para loyalis Sukarno dan kaum kiri dari pos-pos diplomatik, maka mereka digantikan oleh orang-orang yang diangkat oleh Orde Baru. Mereka mulai menyisihkan orang-orang yang menentang rezim Orde Baru. Orde Baru membuat banyak kebijakan baru termasuk untuk warga Indonesia yang pada saat itu berada di luar negeri. Banyak warga Indonesia yang berada di luar negeri seperti diplomat, politisi, perwira militer, staff di seluruh misi Indonesia, pekerja budaya dan termasuk para mahasiswa yang sengaja diberangkatkan untuk belajar di negara-negara maju. WNI yang sedang berada di luar negeri tidak mengetahui banyak

⁶¹ Baskara T. Wardaya. *op cit* hlm 20

⁶² Jusuf Wanandi. *op cit* hlm 89

mengenai peristiwa yang sedang terjadi, hanya pejabat tinggi yang dapat pulang dengan segera setelah peristiwa G30S meletus. Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik memanggil pulang enam duta besar Indonesia yang merupakan anggota atau simpatisan PKI: Hanafiah Crypto (Ceylon), S. Tahsin (Mali), Soekrisno (Vietnam Utara), Soedjono (Ghana), A.M. Hanafi (Kuba), dan Djawoto (Peking, Tiongkok). Kementerian Luar Negeri Indonesia juga melakukan pembersihan dari elemen prokomunis. Soebandrio memprediksi bahwa 75 diplomat yang menjabar di luar negeri akan dipecat.⁶³

Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri sebagian besar adalah mahasiswa karena sekitar tahun 1960 kesempatan untuk belajar ke negeri-negeri komunis sangat terbuka. Indonesia telah menjalin hubungan dekat dengan negara-negara maju tidak hanya pada hubungan politik dan diplomatik tetapi juga pada program pendidikan dan kebudayaan. Ford Foundation merupakan program paling terkenal yang memberikan beasiswa kepada para ekonom muda Indonesia.⁶⁴ Pemerintah Rumania menawarkan puluhan beasiswa untuk pelajar Indonesia, sekitar 30 orang Indonesia dikirim untuk belajar di bidang kedokteran, ekonomi, dan pertambangan. Sekitar 2.000 orang Indonesia belajar di Uni Soviet, sekitar 600 orang mengikuti program universitas regular dan sisanya di berbagai perguruan tinggi militer, partai, dan program lainnya.

Departemen Pendidikan RI mengeluarkan instruksi pada tanggal 7 Mei 1966 untuk seluruh pelajar Indonesia di luar negeri untuk menjalani 'screening' untuk

⁶³ "Ambassadeur Teruggeroepen". Gereformeerde Gezinsblad, 20 April 1966

⁶⁴ Amin Mudzakkir. *op cit* hlm 173

menentukan loyaltasnya dibantu oleh Menteri Luar Negeri yang segera mengumumkan proses *'screening'* yang akan dilakukan.⁶⁵ *Screening* dilakukan dengan pengaturan khusus yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, pada umumnya orang Indonesia (dalam kasus kelompok atau organisasi tertentu, atau perwakilan mereka) dipanggil ke kedutaan setempat dan diminta untuk menyatakan sumpah setia. Mereka yang menolak akan diperintahkan untuk menukarkan paspor mereka dengan dokumen perjalanan yang hanya berlaku untuk satu kali perjalanan kembali ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri kemudian mengumumkan hasil *screening* yang telah dilakukan pada tanggal 15 Mei 1966.⁶⁶ Sarmadji yang merupakan salah satu eksil Indonesia menceritakan kisah *screening* nya dalam buku Tanah Air yang Hilang:

“Di seluruh negara sosialis kuasa usaha dipegang oleh militer. Kedutaan berada di tangan Kolonel Slamet, dan keluarlah perintah: ‘Kamu memilih siapa?’ Saya jawab: ‘Berangkat dengan nama Soekarno, ya pulang dengan nama Soekarno. Saya tak bisa setengah-setengah, yo Soekarno yo Soeharto. Saya Soekarno, tidak bisa jadi Sukar-To.’ Paspor saya tidak diperpanjang.”⁶⁷

Mereka yang menolak pemerintahan Soeharto dianggap sebagai pengikut komunis terlebih bagi mereka yang tinggal di negara-negara sosialis. Orde Baru seringkali menyimpulkan bahwa orientasi politik seseorang sejalan dengan ideologi politik negara tempat mereka belajar, terbukti ketika para pelajar di AS lebih cenderung tidak dicurigai sementara pelajar di Uni Soviet dan Tiongkok dianggap sebagai kamu kiri. Sebagian eksil berafiliasi dengan PKI, namun sebagian lagi tidak

⁶⁵ David T. Hill. *op cit* hlm 32

⁶⁶ Gusnelly, *Diaspora dan Identitas Komunitas Eksil Asal Indonesia di Belanda*. Jurnal Kajian Wilayah. Volume 8, No. 1, 2017, hlm 34

⁶⁷ Martin Aleida. *op cit* hlm 57

berafiliasi dengan PKI sama sekali, mereka adalah kalangan nasionalis Sukarno. Peristiwa 1965-1966 bukan hanya upaya untuk menghancurkan PKI dari Indonesia tetapi juga para pengikut setia Sukarno. Pencabutan paspor yang dilakukan beralasan bahwa mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Seluruh warga Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak terkecuali mereka yang juga sedang bertugas dituntut untuk menyatakan kesetiaannya pada Soeharto. Eksil Indonesia menganggap Orde Baru sebagai sebuah otoritas tunggal yang mempunyai kekuasaan atas pihak lain.⁶⁸ Rombongan delegasi Indonesia sedang dikirim ke Cina ketika peristiwa G30S meletus, mereka menghadiri perayaan hari nasional Tiongkok. 4500 pengunjung Indonesia di seluruh Tiongkok ikut berpartisipasi dalam acara politik, ekonomi, militer, dan budaya. 28 delegasi Indonesia yang semuanya berjumlah 500 orang sedang berada di Beijing.⁶⁹

Delegasi dari konferensi “Anti-Imperialist” tiga benua di Havana ditarik, terdapat dua delegasi, delegasi resmi dan non-resmi. Delegasi resmi dipimpin oleh Jenderal Latief Hadiningrat yang langsung diperintahkan untuk segera kembali ke Indonesia, sementara delegasi non-resmi yang dipimpin oleh Ibrahim Isa, sekretaris dari organisasi solidaritas Afro-Asia yang berbasis di Kairo dicabut paspornya beserta paspor anggota delegasi non-resmi yang hadir oleh kedutaan Indonesia di Havana.⁷⁰ Para Eksil Indonesia tidak cemas akan kemungkinan tindakan politik dari pemerintah terhadap mereka, melainkan khawatir terhadap keluarga yang mereka

⁶⁸ Modelia Novinta Desweriel. *op cit* hlm 61

⁶⁹ Kurasawa Aiko dan Matsumura Toshio. *G30S dan Asia: Dalam Bayang-bayang Perang Dingin*. Jakarta: Kompas. 2016, hlm xii-xiii

⁷⁰ “*Indonesie Roept Delegatie Uit Havanna Terug*”. Gereformeerd Gezinsblad, 14 Januari 1966.

tinggalkan di Indonesia. Alat komunikasi sangat minim pada saat itu, yang mereka ketahui hanya situasi politik yang sedang kacau di Indonesia. Eksil Indonesia telah membayar harga yang sangat mahal atas kesetiaan dan perlawanan politik mereka terhadap pemerintahan Orde Baru, mereka diwajibkan untuk melepaskan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia, kesempatan untuk kembali secara permanen ke tanah air mereka dan (setidaknya sampai jatuhnya Soeharto tahun 1998) untuk menjaga komunikasi bebas dengan keluarga mereka. Semboyan kebebasan adalah hak semua bangsa terasa hambar bagi mereka karena kehilangan kewarganegaraan telah memblokir akses mereka akan hak dan perlindungan, serta status hukum untuk keperluan visa.